

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era keterbukaan informasi seperti saat ini, telah mendorong publik untuk menuntut pemerintah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Setyowati, Isthika & Pratiwi (2016) pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

Usaha mencapai terciptanya akuntabilitas kepada publik, pemerintah telah membuat regulasi yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Bentuk dari pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan pada satu periode kepada para *stakeholders*. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Hasil dari pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Apabila laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), artinya pemerintah daerah berhasil menghadirkan pemerintahan yang mampu mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas, jika laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ada potensi terjadinya kerugian keuangan daerah dan lemahnya pengendalian internal.

Pihak yang berhak menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 4 macam opini yang di berikan BPK yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini ada 3 faktor, faktor yang pertama itu adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Nurillah & Muid (2014) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan

SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi keuangan Pemerintahan Daerah. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sama halnya di dalam pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Pengendalian Internal. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah komitmen organisasi. Menurut Ikhsan (2011) Secara konseptual komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana seseorang memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam

organisasi itu. Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi (Ratifah & Ridwan, 2012). Maka dari itu, komitmen organisasi dapat menghasilkan rasa ikut memiliki bagi pekerja terhadap organisasi. Rasa ikut memiliki ini menjadi penting karena jika pekerja sudah memiliki rasa ini maka pekerja akan merasa senang dalam menjalankan pekerjaannya di organisasi, selain itu rasa memiliki ini juga akan membuat pekerja bertanggungjawab melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 dan 2016 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK, hal ini sebuah peningkatan mengingat Kabupaten Cilacap 10 tahun sebelumnya selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan BPK. Berdasar keadaan tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peningkatan tersebut mungkin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, dan komitmen organisasi yang mungkin sudah mulai diterapkan dengan baik pada pemerintah daerah Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016), perbedaan dari penelitian yang terdahulu adalah penggunaan

sampel dalam penelitian ini yaitu semua pengelola keuangan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Cilacap, karena peneliti sebelumnya Yuliani & Agustini (2016) meneliti pada daerah Kabupaten Magelang, dalam penelitiannya ada 5 variabel independen yang di uji, yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pengendalian intern. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan lainnya dari penelitian sebelumnya adalah seluruh kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner yang dikembangkan dalam penelitian Andrianto (2017).

Dalam penelitian ini peneliti menghilangkan 3 variabel independen yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. Penghilangan 3 variabel independen ini didasarkan sudah konsistennya hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu Mahaputra & Putra (2014), Wati, Herawati, & Sinarwati (2014), Murapi (2016), menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan Darwanis & Mahyani (2009), Pradono & Basukianto (2015), Murapi (2016), menunjukkan

bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain juga dilakukan Udiyanti, Atmadja, & Darmawan (2014), Wati et al (2014), Mahaputra & Putra (2014) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti juga menambahkan variable independen yaitu komitmen organisasi. Hal ini didasarkan dari saran yang di dapat pada penelitian Yuliani & Agustini (2016) dan Murapi (2016)

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis akan mengangkat penelitian ini dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD di Kabupaten Cilacap)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan kepada pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia khususnya pada akuntansi di pemerintahan.
3. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan berbagai teori yang menjadi dasar penelitian ini, teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Pada bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dan dilanjutkan dengan menguraikan temuan-temuan dalam analisis data serta menjelaskan temuan tersebut.

BAB V: Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.